

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATURE

- A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).
- Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994).
- Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Pres, Yogyakarta.
- HAW, W. (2003). *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. jakarta: raja grafindo persada.
- Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, PT Kencana Prena Media Group, Jakarta, 2005,
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Muchsan,*Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*,Yogyakarta,200,
- Ndraha, Taliziduhu. (1985). *Pembangunan Desa dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Yayasan karya Dharma.
- Nurcholis, H. (2001). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Pramesti, T. J. A. (2013). *Kedudukan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemiihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafinda, Jakarta, 2005,
- Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indoensia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1996,
- Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia terbitan-2,
- Sulismadi, Wahyudi, Ulum dan Salahudin, *Modul Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Electronic Government*, Penerbit Buku Litera Yogyakarta, 2017.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- peraturan menteri dalam negeri no. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

C. JURNAL

Adam Latif, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019).

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, 2000, Fakultas Hukum Unpad, Bandung,

I Made Indrayana, I Wayan Parsa, I Nengah Suharta, *pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd) terhadap kinerja kepala desa di desa antap kecamatan selemadeg kabupaten tabanan*, Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019

Iswadi Purnama, Tjuk Wirawan, Slamet Suhartono”*Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Pengawas Kinerja Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*” Magister Hukum Universitas Wiraraja Terbitan-5

Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol 3 Nomor 8, Agustus 2015,

Munif Rochmawanto, *kedudukan badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2017, terbitan ke 5

Ni,matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan pertama, Nusa Media, Bandung, 2009,

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo, S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Adminsirrmis Negara*, Cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, .

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,